

**RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya selama lima tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Jayawijaya.

Melalui upaya yang maksimal penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diselesaikan, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Akhirnya, semoga memberi manfaat.

Wamena, Desember 2021  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Jayawijaya



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
<b>BAB 2</b>	
<b>GAMBAR PELAYANAN DINAS PUPR</b>	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR	6
2.1.1. Tugas	6
2.1.2. Fungsi	6
2.1.3. Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Aparatur	9
2.2.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
2.2.2. Keadaan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan/Penjurangan	9
2.2.3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan	9
2.2.4. Keadaan Sarana dan Prasarana	10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR	15
<b>BAB 3</b>	
<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PUPR</b>	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR	19
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PUPR Provinsi dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten	23
3.4. Telaahan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2014-2019	26
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	27
3.6. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	28
3.7. Penentuan Isu-isu Strategis	29
<b>BAB 4</b>	
<b>TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUPR</b>	31
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya	31
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR	31
4.3. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	33
<b>BAB 5</b>	
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	36
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	36



<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	.....	39
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	.....	39



<b>KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN</b>	.....	50
7.1. Indikator Kinerja Dinas PUPR Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	.....	50
7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Tahun 2019-2023	.....	52



<b>PENUTUP</b>	.....	53
----------------	-------	----

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2023.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, yang setiap tahun dijabarkan dan menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau Perencanaan Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis adalah Rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Renstra tersebut akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung jawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan SKPD maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Penyusunan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersama dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah Landasan Konstitusional yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 29/PRT/2018/ tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi
18. .... Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19. .... Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua
20. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya
22. Perda Pengelolaan Keuangan



23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
24. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.
2. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan operasional.
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR

- 2.2. Sumber Daya Dinas PUPR
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUPR
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PUPPR**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi Dinas PUPR
- 5.2. Arah Kebijakan Dinas PUPR

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Indikator Kinerja Dinas PUPR yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR**

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya.

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

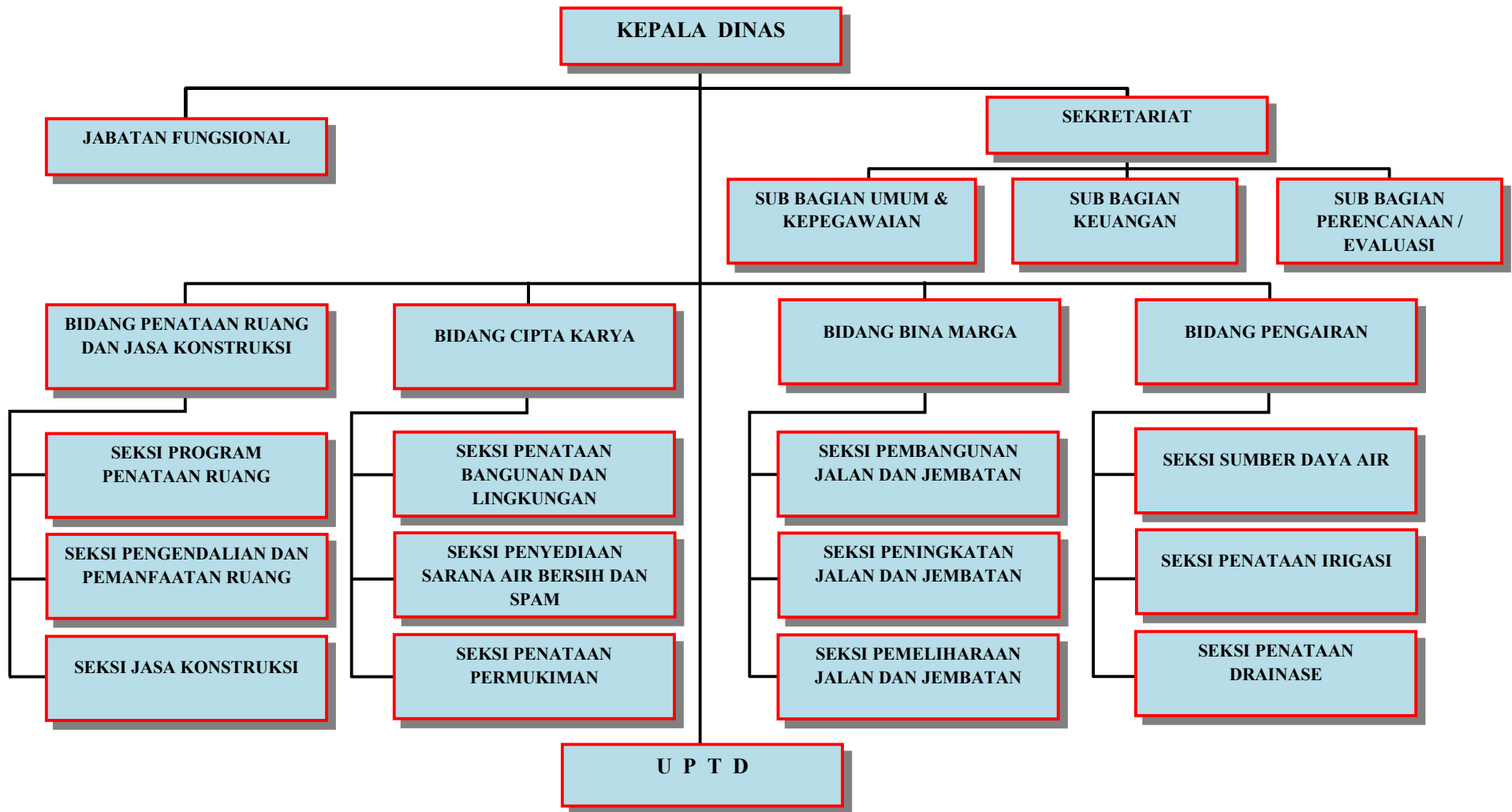
- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris :
  - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2 Sub Bagian Keuangan
  - 2.3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi :
  - 3.1 Seksi Program Penataan Ruang
  - 3.2 Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
  - 3.3 Seksi Jasa Konstruksi
4. Bidang Cipta Karya :
  - 4.1 Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - 4.2 Seksi Penyediaan Sarana Air Bersih dan SPAM
  - 4.3 Seksi Penataan Permukiman
5. Bidang Bina Marga :
  - 5.1 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - 5.2 Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - 5.3 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Bidang Pengairan :
  - 6.1 Seksi Pengairan
  - 6.2 Seksi Sumber Daya Air
  - 6.3 Seksi Penataan Drainase

**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya**



## 2.2 Sumber Daya Aparatur

### 2.2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya berjumlah 57 ( lima puluh tujuh ) orang, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada Tabel 2.2.1 berikut.

**Tabel 2.2.1.**  
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )	Persentase
1	Strata 2	0,00	0,00
2	Strata 1 / D-IV	28,00	49,13
3	D-III	2,00	3,50
4	SLTA	25,00	43,85
5	SLTP	1,00	1,76
6	SD	1,00	1,76
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			

### 2.2.2 Keadaan Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan/Penjennangan

Keadaan Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya yang telah mengikuti pelatihan/penjennangan sebagaimana pada Tabel 2.2.2 berikut.

**Tabel 2.2.2.**  
**Keadaan Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan/Penjennangan**

No	Jenis Pelatihan/Penjennangan	Jumlah ( Orang )	Persentase
1	Diklat Pim II	1,00	1,76
2	Diklat Pim III	6,00	10,53
3	Diklat Pim IV	10,00	17,54
<b>TOTAL PEGAWAI</b>			

### 2.2.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya adalah Golongan III( Tiga ) berjumlah 30 orang dan yang paling sedikit adalah Golongan I (satu) yang berjumlah 1 Orang. Secara rinci keadaan Pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada Tabel 2.2.3 berikut.

**Tabel 2.2.3.**  
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda ( IV/c )	1,00
2	Pembina Muda Tk. I ( IV/b )	1,00
3	Pembina Muda ( IV. A )	2,00
4	Penata Tk. I ( III/d )	7,00
5	Penata ( III/c )	7,00
6	Penata Muda Tk. I ( III/b )	6,00
7	Penata Muda ( III/a )	11,00
8	Pengatur Tk. I ( II/d )	3,00
9	Pengatur ( II/c )	4,00
10	Pengatur Muda Tk. I ( II/b )	4,00
11	Pengatur Muda ( II/a )	10,00
12	Juru Tk. I ( I/d )	--
13	Juru ( I/c )	1,00
14	Juru Muda Tk. I ( I/b )	--

## 2.2.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.4. berikut.

**Tabel 2.2.4**  
**Keadaan Sarana dan Prasarana**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
1	Meja Kerja	80,00				Baik
2	Kursi Kerja	74,00				Baik
3	Lemari Arsip Besar	31,00				Baik
4	Lemari Arsip Kecil	27,00				Baik
5	Kursi Tamu	9,00				Baik
6	Kursi Sofa	1,00				Baik
7	Komputer Lenovo	3,00				Baik
8	Komputer Samsung	1,00				Rusak Ringan
9	Printer Pixma	2,00				Rusak Ringan
10	Printer Epson	3,00				Baik
11	Brankas Besar	1,00				Baik
12	Gedung Kantor	Memadai				Baik
13	Jaringan Listrik dan Air	Memadai				Baik
14	Aset Tetap Lainnya	Memadai				Baik

## 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR

Sejauh ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan di bidang infrastruktur telah berkontribusi memberikan kemajuan di sektor lain, terutama perhubungan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga di sektor pemerintahan umum lainnya.

Disektor Jalan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 538 Tahun 2017 Tanggal 04 Mei 2017 tentang



Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dan telah dilakukan survey kondisi pada bulan November Tahun 2018 diperoleh data :

Panjang Jalan Kabupaten 384,63 Km

Kondisi Baik 275,40 Km atau 71,60 %

Kondisi Rusak Ringan 62,61 Km atau 16,28 %

Kondisi Rusak Berat 46,62 Km atau 12,12 %

Disektor Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya sampai dengan akhir bulan Desember 2018 telah membangun Jembatan sepanjang 1.607,90 M' terdiri dari :

- Jembatan Rangka Baja 3,00 unit dengan kondisi baik
- Jembatan Beton 9,00 unit dengan kondisi baik
- Jembatan Kayu 142,00 unit dengan kondisi baik 50,00 % dan kondisi rusak ringan 30,00 % dan kondisi rusak berat 20,00 %

Disektor Irigasi, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, melalui Dinas PUPR sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan dalam mengelola Irigasi dengan jaringan-jaringan maksimum 1000 Ha.

Sampai dengan Bulan Desember 2018 data jaringan Irigasi sebagai berikut :

- Luas Jaringan Irigasi : 30.395,71 M2, terdiri dari Saluran Beton 6.627,15 M' dan Saluran Tanah 23.620,71 M'
- Bendung 10,00 Unit (Volume)
- Box 29,00 Unit (Lebih Spesifik)
- Pintu Air 21,00 Unit

Kondisi Jaringan Irigasi :

- Kondisi Baik 24.770,47 M2
- Kondisi Rusak Ringan 3.225,24 M2
- Kondisi Rusak Berat 2.400,00 M'
- Luas Lahan Budidaya Pertanian :
- Lahan Sawah 332,00 Ha
- Lahan Beririgasi 58,00 Ha

- Lahan Tadah Hujan 292,00 Ha
- Lahan Kering 38.568,00 Ha

Dibidang Cipta Karya, Sarana Air Bersih dan SPAM, Sarana dan Prasarana Sanitasi, Kinerja Pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana jenis pelayanan dasar keciptakaryaannya berupa Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Sampai dengan Bulan Desember 2018 tercatat sebagai berikut :

- Data Penyediaan Air Bersih/Air Minum melalui Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, penampungan air hujan (PAH), dengan jumlah Rumah Tangga berakses Air Minum sebanyak 15.808,00 Rumah Tangga atau 30,31 % dari total seluruh Rumah Tangga 52.162,00. Capaian Indikator Kinerja ini belum maksimal untuk itu akan menjadi perhatian pada 5 (lima) tahun kedepan.
- Data Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, dengan jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 14.313,00 Rumah Tangga dari total rumah tangga 52.162,00 atau 27,44 %. Capaian Indikator Kinerja ini belum maksimal untuk itu akan menjadi perhatian pada 5 (lima) tahun kedepan.
- Data Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan ( SLF ), Penataan Pedoman Harga Standar Bangunan Gedung serta Penataan Kawasan di Kota Wamena. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 4.163,00 dari jumlah seluruh Bangunan 54.795,00 atau 7,60 %. Sedangkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) belum dapat dilaksanakan mengingat Bulan Juli 2019 baru ditetapkan Peraturan Bupati Nomor : 24 Tanggal 24 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Disektor Usaha Jasa Konstruksi, Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya memberikan Kontribusi yang nyata dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pelaku usaha jasa konstruksi. Bahkan untuk pengguna jasa seperti SKPD-SKPD

lain juga telah mendapat layanan berupa bimbingan teknis fungsional sertifikasi barang dan jasa.

Kinerja Pelayanan Sektor Tata Ruang yang difokuskan pada kawasan perkotaan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan dihasilkannya beberapa dokumen DED ruang public yang perencanaannya secara komprehensif ditujukan untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat perkotaan. Secara bertahap dokumen DED akan direalisasikan ke dalam pembangunan fisik ruang public terutama pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

Masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang dirasakan, misalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Perizinan Tata Ruang belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya mengingat regulasi yang berhubungan dengan Penataan Ruang akan dilengkapi pada 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal ( SPM ). Adapun jenis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum yang sedang dilaksanakan adalah : (a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian sampai dengan akhir 2019 adalah 32,02 % (b) Penyediaan pengolahan air limbah domestik sampai dengan akhir 2019 adalah 28,88 %. Capaian kinerja SPM Pekerjaan Umum dikabupaten Jayawijaya sesuai cluster pelayanan masuk karegori buruk, oleh sebab itu indikator pelayanan ini akan menjadi perhatian yang serius pada tahun 2020. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3.

**KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN 2013 - 2018**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA TAHUN					REALISASI KINERJA TAHUN					CAPAIAN TAHUN					TA A REI	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	32.60	34,00	32.14	33.90	34,08	40,00	13.07	12.60	13.55	12,61	22,00	38.44	38.89	39.97	37,00	55,00		
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	%	30.17	31.05	31.27	31.60	32.04	32,69	9.14	9.40	10.08	10.53	21,35	29.44	30.06	31.90	30.04	65,31		
4	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang	Persentase Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi	%	55.24	57.33	58.12	59.78	60.60	62,25	36.59	37.13	38.50	40.20	44,07	63.82	63.89	64.40	66.44	70,79		
5	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara	%	39.78	41.73	42.06	42.88	43.79	44,64	27.01	27.49	28.35	28.97	32,09	64.73	65.36	66.11	66.16	71,89		
6	Meningkatnya Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian	%	32.90	33.14	33.60	34.02	34.77	35,48	21.74	22.08	22.16	21.88	13,79	32,86	33,14	35,28	36,93	38,87		
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sanitasi Perkotaan dan	Rasio Rumah Tangga Bersanitasi	%	28.21	28.77	29.03	29.42	29.87	30,27	21.20	21.49	22.01	22.44	8,31	22,78	24,12	25,03	26,82	27,44		
8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan dan	Rasio Penduduk Berakses Air Minum	%	28.33	28.84	29.03	29.21	29.35	29,44	17.55	18.17	18.80	19.11	8,92	26,43	27,06	28,80	29,45	30,31		
9	Meningkatnya Infrastruktur Saluran/Drainase/Gorong-gorong yang Berkelanjutan	Persentase Saluran/Drainase/Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik, Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	38.61	40.78	41,00	41.12	41.33	41,67	29.55	29.93	30.11	30.62	31,80	72.46	73,00	73.22	74.09	76,32		
10	Meningkatnya Penanggulangan Banjir, Akibat Meluapnya	Persentase Penanggulangan Banjir Pada Sungai Yang	%	17.05	17.16	17.21	17.37	17.59	16,62	12.04	12.12	12.35	12.57	12,93	70.16	70.42	71.09	71.44	73,38		
11	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	35.01	38.47	38.62	38.70	39,00	40,33	16.98	17.10	17.43	18.33	18,28	44.14	44.28	45.04	47.01	67,81		
12	Meningkatnya Infrastruktur Perdesaan	Persentase Cakupan Infrastruktur Perdesaan	%	41.05	43.12	43.30	43.38	43.61	43,77	21.03	21.22	21.42	21.56	22,14	48.77	49.01	49.26	48.05	50,58		

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR**

Seiring dengan berkembang pesatnya kawasan permukiman, maka penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam menyediakannya menjadi sangat besar. Beragam permasalahan akan membesar dan terus terjadi, seperti padatnya arus transportasi perkotaan, kondisi sanitasi yang memburuk, permintaan akan sarana dan prasarana air bersih/air minum yang meningkat serta potensi terjadinya kekumuhan akibat konsentrasi penduduk dalam kawasan, rendahnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah di dalam selokan/drainase menyebabkan saluran/drainase tersumbat yang menimbulkan genangan air di beberapa tempat. Di lain pihak, ketersediaan anggaran walaupun terjadi peningkatan nilai setiap tahun, belum signifikan memberikan solusi percepatan pembangunan untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur. Diperlukan manajemen dan kebijakan yang tepat dalam memberikan pelayanan yang walaupun belum mampu mengimbangi kebutuhan diharapkan mampu memberikan dan menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor lain. Sementara pada masa layanan, berbagai multi efek ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur Pekerjaan dan Penataan Ruang yang telah dibangun tersebut pada akhirnya juga dapat memberikan kualitas permukiman. Disamping itu, infrastruktur pekerjaan umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya, antara lain sektor pertanian, industri dan perdagangan, perikanan dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah secara signifikan.

Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu daerah, yang pada gilirannya menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai

tujuan dan sasaran pembangunan lainnya, termasuk kaitannya dengan pencapaian SDG's pada tahun mendatang.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image dari masyarakat. Sementara itu kinerja infrastrktur merupakan faktor kunci dalam membentuk daya saing suatu daerah. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi masalah kesenjangan antar kawasan, membuka isolasi, perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Penataan Ruang pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini disebabkan Penataan Ruang dapat dijadikan panduan bagi pemanfaatan ruang, oleh karena itu tujuan tertinggi dari keseluruhan proses penataan ruang adalah terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak dalam memanfaatkan ruang secara berkelanjutan, terutama bagi kawasan strategis dan cepat tumbuh. Maka dari itulah merupakan suatu peluang bagi sektor tata ruang agar dapat menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang secara lebih detail yang merupakan pedoman dalam pembangunan segala aspek, khususnya dikawasan perkotaan. Pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, muatan terkait dengan isu lingkungan hidup semakin ditekankan. Salah satunya adalah dalam kaitan dengan perencanaan ruang wilayah kota yang diharuskan memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ( RTH ). Terkait dengan penjelasan tersebut, bahwa sektor tata ruang juga dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal lain juga yang memerlukan perhatian serius lima tahun yang akan datang adalah pentingnya seluruh jajaran ke-PU-an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang tinggi. Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastrktur khususnya bidang ke-PU-an adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, sebaran penduduk yang tidak merata serta masih seringnya pembebasan

lahan/pemalangan pekerjaan pembangunan infrastruktur oleh kelompok masyarakat yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan social, meningkatkan pelayanan public, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Merealisasikan semua keinginan demi mencapai tujuan ini, merupakan tantangan terbesar yang harus dapat dijawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya dalam 5 ( lima ) tahun mendatang. Berdasarkan fungsi dan perannya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tantangan dan peluang yang sangat besar seiring dengan perkembangan wilayah serta regulasi yang mengatur terkait dengan berbagai layanan infrastruktur yang harus dipenuhi. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengembangan pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya :

**Tantangan :**

- Adanya sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- Kondisi geografis topografis dan geologi Kabupaten Jayawijaya di daerah rawan bencana banjir.
- Banyak sekali permintaan diluar rencana Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang harus dilayani.
- Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.
- Sering terjadi pemalangan pembangunan infrastruktur.
- Berkaitan dengan Hak Ulayat yang rumit.
- Belum adanya laboratorium aspal, mekanika tanah dan peralatan laboratorium agregat dan beton.

**Peluang :**

- Kondisi sosial politik masyarakat disebagian Kabupaten Jayawijaya yang cukup kondusif.

- Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Jayawijaya yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah.
- Ketersediaan sumber daya alam bagi pembangunan infrastruktur.
- Adanya penerapan nyata UU Nomor 32/2004 (Otda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- Adanya “ **Musrenbang** “ dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
- Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.
- Adanya Komitmen Pimpinan.

**Potensi yang ada :**

- Untuk mendukung pelayanan Jalan kabupaten telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 538 Tahun 2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten dengan total panjang 384,63 Km dan jalan desa/lingkungan sepanjang 10,35 Km.
- Jaringan Irigasi di Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Kepmen PU Nomor 293 Tahun 2014 tentang Penetapan status Daerah Irigasi dengan peta dan luas Daerah Irigasi seluas 2.256,00 Ha



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PUPR

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada table 3.1. dan table 3.2.

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan Rekomendasi IMB</li> <li>Penerbitan Surat Peringatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 26/2007</li> <li>Permen PU No.01/PRT/M/2013</li> <li>Permen PU No.24/2007</li> <li>Perda No.13/2013</li> <li>Perbub No.24/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan proses verifikasi dan cek lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran masyarakat tentang prosedur dan pentingnya IMB masih kurang.</li> <li>Tingkat kesulitan geografis wilayah</li> <li>Banyak tanah masyarakat belum bersertifikat</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Perencanaan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.4/2001</li> <li>UU No. 28/2002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya Dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah fasilitas MCK,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, Pemeliharaan, Dan Pengendalian/ Pengawasan Gedung dan Sarana Umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 1/2011</li> <li>Perpres No.73/2011</li> <li>Permen PU No.16/2008</li> <li>Permen PU No.25/2007</li> </ul>	Master Plan Bangunan Gedung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>tentang kesehatan lingkungan masih kurang.</li> <li>Ketersediaan lahan baru untuk pembangunan gedung perkotaan masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persampahan, IPAL, dan Air Bersih Tingkat Rumah Tangga masih kurang.</li> <li>Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan terpadu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.</li> <li>Pembinaan usaha jasa konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.38/2004</li> <li>PP No.79/2013</li> <li>SK Bupati No. 538/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum lengkapnya data kondisi jalan dan jembatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Jalan masih kurang memperhatikan keamanan konstruksi jalan.</li> <li>Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesulitan geografis.</li> <li>Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.</li> <li>Pemberdayaan P3A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.7/2004</li> <li>PP No.20/2006</li> <li>Permen PU No.32/PRRT/M/2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data kondisi Sarpras Irigasi belum lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran masyarakat Dalam penggunaan Air.</li> <li>Tingginya sedimentasi</li> <li>Tingginya Daya Rusak Air.</li> <li>Permintaan layanan yang tinggi pada waktu bersamaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya cakupan layanan Irigasi.</li> <li>Belum termanfaatkannya potensi sumber daya air baku.</li> <li>Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu Sistem Irigasi.</li> <li>Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 18/2008</li> <li>PP No. 18/2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya Peralatan Laboratorium konstruksi.</li> <li>Kualitas alat berat yang dimiliki kurang memadai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya Komitmen Pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat.</li> </ul>

Kajian terhadap Renstra Dinas PUPR Provinsi Papua	Terwujudnya Kualitas Layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 4/2001</li> <li>• UU No. 28/2002</li> <li>• UU No.1/2011</li> <li>• Permen PU No.01/PRT/M/2013</li> <li>• Permen PU No. 24/2007</li> </ul>	Penyediaan layanan di bidang infrastruktur dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesulitan geografis</li> <li>• Besarnya cakupan wilayah pelayanan</li> </ul>	Kapasitas membangun di bidang infrastruktur masih perlu ditingkatkan
Kajian terhadap Renstra Kemen teriaan Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat	Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 4/2001</li> <li>• UU No. 28/2002</li> <li>• UU No.1/2011</li> </ul>	Penyediaan layanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesulitan geografis.</li> <li>• Luasnya cakupan pelayanan</li> </ul>	Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan misalnya jalan lingkungan dan jalan desa.

**Tabel 3.2.**  
**Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal )**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	Perkembangan Ekonomi global mendorong setiap Negara untuk terus memacu pembangunan disegala sektor. Adanya beberapa target internasional maupun regional antar Negara seperti MEA dan AFTA menuntut Indonesia untuk mempersiapkan diri. Hal ini tentu tak lepas dari penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan wilayah yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan di segala bidang.	Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 Bab II terdapat evaluasi hasil pembangunan 2012-2014. Dalam paparan tersebut, Nampak jelas bahwa urusan pekerjaan umum dibidang infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta penyelenggaraan konstruksi masih perlu ditingkatkan. Hal ini terjadi secara nasional dan tak terkecuali di Kabupaten Jayawijaya.	Beberapa rencana strategis di Kabupaten Jayawijaya seperti pembangunan taman dan menara salib wio silimo turut berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi guna memperlancar dan mempercepat realisasi kegiatan strategis tersebut.	
		Kebijakan moratorium	Dinas Pekerjaan	

		PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.	Umum Perumahan dan Penataan Ruang memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia sehingga berpengaruh terhadap kemampuan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	
--	--	---	--	--

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya  
Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,  
Berkualitas Dan Berbudaya”**

Misi untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua ( OAP ).
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang urusan infrastruktur wilayah dan penataan ruang yang diselenggarakan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke- 1 dan 5 yaitu :

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PUPR Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya “</b>					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat		Pendorong
1.	<b>Misi 1 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.				
2.	<b>Misi 5 :</b> Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar serta utilitas yang mendukung pariwisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya data lokasi-lokasi wisata.</li> <li>• Banyak sekali permintaan diluar rencana OPD sementara sumber daya tidak mendukung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kepastian hukum (Perda No. 24 Tahun 2018)</li> <li>• Adanya Komitemen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana Terkait fisik dan non fisik penunjang kinerja (SIM, Aplikasi, Jaringan Internet dan lainnya) tidak optimal.</li> <li>• Terbatasnya tenaga professional untuk perencanaan teknis.</li> <li>• Disiplin Rekanan/Pihak ketiga dalam menyelesaikan proses fisik dan administrasi yang masih rendah.</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.</li> <li>• Banyak mata air yang mati berakibat sulitnya air bersih di daerah tertentu.</li> </ul> <p>Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Jayawijaya di daerah rawan bencana banjir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kondisi prasana jalan dan jembatan yang belum mantap.</li> </ul> <p>Adanya sebagian masyarakat yang kontra terhadap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rencana Strategis Dinas PUPR sampai tahun 2023.</li> <li>• Adanya sarana dan Prasarana pendukung.</li> </ul> <p>Adanya sumber daya pada Dinas PUPR.</p>
--	--	--	---	---

				kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.	
				Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.	

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PUPR Provinsi dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PUPR sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR, maka untuk mencapai Visi Kemeterian PUPR“ ***Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***” , ditetapkan Misi Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk untuk mendukung maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kolektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistim logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka wemujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “ ***infrastruktur untuk semua*** “
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meninmgkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

6. Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Kementerian PUPR dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energy dan ketahanan Air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya cakupan layanan Irigasi.</li> <li>Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan informasi.</li> <li>Ketersediaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya potensi sumber air baku.</li> <li>Cakupan lahan pertanian yang belum terlayani irigasi dengan baik.</li> </ul>
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu	Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindak lanjut terhadap usulan penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan drainase
4.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dan kemandapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kesulitan geografis</li> </ul>	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah Pusat	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
5.	Meningkatnya pengembangan sistem jaringan penyediaan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air</li> </ul>	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah tersedianya momerandum Rencana Program Investasi Jangka</li> </ul>



	minum, sanitasi, drainase dan persampahan dengan sistem terpusat berbasis masyarakat.		bersih tingkat rumah tangga masih kurang.		Menengah (RPJMD) bidang cipta karya. <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah tersedianya Dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi</li> </ul>
6.	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Belum kompetensinya Usaha Jasa Konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil		Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5.**

**Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUPR Provinsi Papua	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR Kab. Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan Implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi	Tingkat kesulitan geografis. Besarnya cakupan layanan yang ditangani. Jumlah fasilitas yang tersedia belum mencukupi.	Belum adanya kesepahaman pembagian peran terhadap penanganan permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tercantumnya kawasan strategis provinsi pada dokumen RTRW Kabupaten.</li> </ul>

2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum, air limbah, Drainase dan persampahan yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang.	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah tersedianya memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)</li> <li>bidang cipta karya. Telah tersedianya dokumen buku putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi.</li> </ul>
3.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Belum terpenuhinya persyaratan RTH Perkotaan	Ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Telah tersedianya master plan RTH Perkotaan
4.	Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
5.	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan	Belum tersedianya Master Plan Bangunan Gedung	Prioritas kebutuhan pembangunan gedung
6.	Meningkatnya penyelenggaraan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah pusat	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
7.	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir	Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindak lanjut terhadap usulan Penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan drainase
8.	Meningkatnya fasilitas perumahan dan	Jumlah Fasilitas MCK, Persampahan,	Belum tersedianya data akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah tersedianya memorandum Rencana Program</li> </ul>

	lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	IPAL, dan Air Bersih tingkat rumah tangga masih kurang		<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya.</li> <li>Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi.</li> </ul>
9.	Meningkatnya Pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi	Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi</li> </ul>

### 3.4 Telaahan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2014-2019

Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya di jelaskan pada tabel 3.6. berikut :

**Tabel 3.6.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya  
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat  
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya dukungan layanan Infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Jumlah Fasilitas MCK, Persampahan IPAL, dan Air Bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data perumahan dan permukiman yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersedianya memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya.</li> <li>• Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi.</li> </ul>
2.	Meningkatnya penyediaan dan Pembiayaan perumahan	Masih banyak rumah tidak layak huni	Terbatasnya kemampuan masyarakat	Adanya kesamaan program dan penanganan rumah tidak layak huni
4.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Jumlah Fasilitas MCK, Persampahan IPAL, dan Air Bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersedianya memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya.</li> <li>• Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi.</li> </ul>

### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Kabupaten Jayawijaya dengan Ibukota Wamena memiliki luas 13.925,00 Km<sup>2</sup> terdiri dari 40 Distrik, 4 Kelurahan dan 328 Kampung. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukan bagi pertanian seluas 1.756,99 Ha. Letak geografis Kabupaten Jayawijaya di antara 138.30° - 139.40° BT dan 3.45° - 4.20° LS dengan ketinggian rata-rata 4.500-5000 meter dari permukaan laut.

#### **1. Permasalahan :**

- Kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua yang hanya dapat dijangkau dengan Pesawat Udara.
- Kawasan Pegunungan dan lembah yang rawaan bencana banjir dan erosi.
- Adanya beberapa wilayah yang terisolasi akibat kendala fisik.
- Belum adanya Rencana Umum Tata Ruang Kawasan ( RUTRK );
- Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan ( RDTRK );
- Belum adanya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL );

#### **2. Potensi :**

- Ada kemungkinan pengembangan aktivitas yang lebih beragam, sesuai dengan karakteristik geografis wilayah, baik terkait dengan penentuan kawasan lindung maupun budi daya baik untuk pertanian maupun pengembangan wisata alam.
- Adanya dataran Lembah Baliem yang subur yang memungkinkan untuk pengembangan budi daya pertanian.
- Adanya potensi pertambangan dan bahan galian.

RTRW Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033 yang sudah ditetapkan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR, Perda RTRW mengatur tentang rencana struktur dan pola ruang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi Dinas PUPR untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui program kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya.

### **3.6 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi oleh KLHS. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-undang.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam

penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berkelanjutan;
- Peningkatan Kualitas SDM;
- Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

### **3.7 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUPR Provinsi Papua, serta hasil telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) 2013 sampai dengan 2033 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya selama ini, dapat dirumuskan Isu-isu Strategis sebagai berikut :

- Pembangunan Pipa Distribusi intake Wasi/Walesi ke IPA ( Kompleks Batalion )
- Pembangunan Laboratorium Konstruksi, meliputi Laboratorium Aspal, Mekanika Tanah, Peralatan Laboratorium Agregat dan Beton.
- Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan ( RDTRK ).
- Peralatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota.
- Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, meliputi Pembangunan Jalan Baru, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Jalan.
- Meningkatkan penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih, guna meningkatkan Persentase Penduduk berakses air minum.

- Meningkatkan penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan IPAL, guna meningkatkan persentase rumah tangga bersanitasi.
- Penataan Saluran/Drainase Dalam Kota.
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung, meliputi IMB dan SLF.
- Pengendalian Banjir kali Wouma.
- Penggantian Jembatan kayu dengan Jembatan Permanen.
- Penyelenggaraan dan pengelolaan Jaringan Irigasi.
- Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sumber Air Baku.
- Pengelolaan PDAM Kabupaten Jayawijaya.
- Pembangunan Jalan Lingkungan Strategis penunjang Pariwisata.
- Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi pada kawasan pariwisata.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUPR

#### 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya mengacu dari visi dan misi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yaitu :

**“ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya “**

Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua ( OAP ).
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta unsur penunjang urusan infrastruktur wilayah dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, maka tugas dan fungsi Dinas PUPR terkait erat dengan Misi ke 1 dan 5, yaitu :

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi.

Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah :

**Tabel 4.2**  
**Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Jayawijaya**

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target					
				2018 (Kodi si Awal)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	Nilai	42,45 ©	50 (CC)	60 (CC)	70 (B)	75 (B)	80 (BB)
2	Meningkatkan konektivitas	Persentase konektivitas	Persen	70.00	75.0 0	80.0 0	85.0 0	88.0 0	90.0 0

	antar distrik	ibu kota kabupaten ke distrik							
	Meningkatnya penataan kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh	Persen	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		49.79	49.88	49.97	50.06	50.15	50.24
	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Persentase infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan		63.20	65.50	67.80	70.10	72.40	74.70

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang	Presentasi anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1	0.8	0.6	0.5	0.4
			Predikat evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00
			Presentase Peningkatan Kapasitas ASN DPUPR		10	20	25	30	40
2	Meningkatkan konektivitas antar distrik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	38,87	39,06	45,54	41,39	42,70	43,85
			Presentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	76,32	77,10	78,40	79,50	80,60	81,70
			Presentase rumah tangga yang bersanitasi	66,32	67,10	68,40	69,50	70,60	11,70
			Cakupan jumlah kampung yang	50,00	50,10	52,00	55,00	60,00	70,00

			telah memiliki infrastruktur air bersih						
			Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian	20,00	22,00	25,00	28,00	30,00	35,00
		Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70,79	71,50	72,40	73,50	74,60	75,00
			Proporsi jembatan dalam kondisi baik	71,89	72,80	73,00	74,50	75,40	76,00
		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dan perkantoran yang memadai	Cakupan OPD yang memiliki gedung kantor yang representatif	80,00	90,00	95,00	96,00	97,00	97,00
			Cakupan distrik yang sudah memiliki gedung kantor yang representatif	50,00	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Menigkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	45,00	60,00	65,00	67,00	70,00	75,00
			Cakupan ruang publik yang berubah peruntukkannya per tahun	50,00	50,00	50,00	75,00	80,00	85,00
			Presentasi ketaatan terhadap RTRW	26,68	27,03	28,44	32,43	37,14	43,88

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya adalah :

**Tabel 5.1.  
Strategi dan Kebijakan  
Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penerapan SOP Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelaporan Kinerja Secara Berkelanjutan dan Tepat Waktu
			Peningkatan Kapasitas ASN DPUPR	Peningkatan Kapasitas ASN DPUPR
2	Meningkatkan konektivitas antar distrik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan irigasi	Peningkatan Pembangunan / Rehabilitasi Kondisi Irigasi
			Meningkatkan Pembangunan Air Bersih Perumahan	Peningkatan Pembangunan Jaringan Air Bersih
			Meningkatkan Pembangunan Sanitasi	Peningkatan Pembangunan Sanitasi
			Meningkatkan Infrastruktur Air Bersih Pada Perkampungan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih pada kawasan Perkampungan
			Meningkatkan Irigasi pada lahan pertanian	Peningkatan Pembangunan Irigasi pada Wilayah Pertanian Guna Meningkatkan Perekonomian
		Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	Peningkatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
			Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Peningkatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dan	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	Pembangunan Gedung kantor

		perkantoran yang memadai	Perkantoran	
			Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Perkantoran	Pembangunan Gedung Kantor Distrik
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	Meningkatkan Pengawasan dalam Pengurusan IMB	Peningkatan Pengawasan untuk Pengurusan IMB
			Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Meningkatkan Ketaatan Pembangunan berdasarkan pada RTRW	Peningkatan Pengawasan serta pengendalian terhadap pembangunan berdasarkan pada RTRW



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD.

Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan, pengerahan semua sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, Barang Jasa atau Modal.

Rencana Program selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan persentase dan dalam satuan Rupiah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel 6.1. sebagai berikut :



TABEL 6.1.  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA/RPJMD				
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	(Rp)			
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)					
1	2	3	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					110.280.000.000,00		110.280.000.000,00			110.780.000.000,00			119.740.000.000,00		120.135.000.000,00		
	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.130.000.000,00		7.130.000.000,00			7.130.000.000,00			12.600.000.000,00		7.605.000.000,00		
	Meningkatkan Konektifitas Antar Distrik	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dan perkantoran yang memadai																		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	%	60.000.000,00	100,00	%	60.000.000,00	100,00	%	60.000.000,00	100,00	%	60.000.000,00	100,00	%	65.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,00	Dok	20.000.000,00	2,00	Dok	20.000.000,00	2,00	Dok	20.000.000,00	2,00	Dok	20.000.000,00	2,00	Dok	25.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP		1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD		4,00	Dok	20.000.000,00	4,00	Dok	20.000.000,00	4,00	Dok	20.000.000,00	4,00	Dok	20.000.000,00	4,00	Dok	20.000.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	6.420.000.000,00	100	%	6.420.000.000,00	100	%	6.420.000.000,00	100	%	6.420.000.000,00	100	%	6.420.000.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN		14,00	Bula	6.400.000.000,00	14,00	Bula	6.400.000.000,00	14,00	Bula	6.400.000.000,00	14,00	Bula	6.400.000.000,00	14,00	Bula	6.400.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00	1,00	Dok	20.000.000,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	180.000.000,00	100	%	180.000.000,00	100	%	180.000.000,00	100	%	450.000.000,00	100	%	450.000.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi		3,00	org	100.000.000,00	3,00	org	100.000.000,00	3,00	org	100.000.000,00	3,00	org	100.000.000,00	3,00	org	100.000.000,00
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi ke PU'an									39,00	org	250.000.000,00	39,00	org	250.000.000,00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang		2,00	Org	80.000.000,00	2,00	Org	80.000.000,00	2,00	Org	80.000.000,00	3,00	Org	100.000.000,00	3,00	Org	100.000.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum		100	%	350.000.000,00	100	%	350.000.000,00	100	%	350.000.000,00	100	%	450.000.000,00	100	%	450.000.000,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia		12,00	Blin	100.000.000,00	12,00	Blin	100.000.000,00	12,00	Blin	100.000.000,00	12,00	Blin	100.000.000,00	12,00	Blin	100.000.000,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia		12,00	Bula	100.000.000,00	12,00	Bula	100.000.000,00	12,00	Bula	100.000.000,00	12,00	Bula	100.000.000,00	12,00	Bula	100.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi SKPD		12,00	Bula	150.000.000,00	12,00	Bula	150.000.000,00	12,00	Bula	150.000.000,00	12,00	Bula	250.000.000,00	12,00	Bula	250.000.000,00



Meningkatkan konektivitas antar distrik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						30.000.000.000,00			30.000.000.000,00			30.000.000.000,00			30.350.000.000,00			30.000.000.000,00		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				100,00	%	30.000.000.000,00	100,00	%	30.000.000.000,00	100,00	%	30.000.000.000,00	100,00	%	30.350.000.000,00	100,00	%	30.000.000.000,00		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis											1,00	Dok	350.000.000,00						
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah di Desa yang Terakses Air Bersih			500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00		
		Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan SPAM			500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00		
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah di Desa yang Terakses Air Bersih			500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00	500,00	SR	10.000.000.000,00		
Meningkatkan konektivitas antar distrik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						10.000.000.000,00			10.000.000.000,00			10.000.000.000,00			10.350.000.000,00			10.000.000.000,00		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Limbah			100,00	%	10.000.000.000,00	100,00	%	10.000.000.000,00	100,00	%	10.000.000.000,00	100,00	%	10.350.000.000,00	100,00	%	10.000.000.000,00		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten											1,00	Dok	350.000.000,00						
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlahn MCK yang terbangun			10,00	Unit	5.000.000.000,00	10,00	Unit	5.000.000.000,00	10,00	Unit	5.000.000.000,00	10,00	Unit	5.000.000.000,00	10,00	Unit	5.000.000.000,00		
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah IPAL Kombinasi MCK Desa yang dibangun			5,00	unit	5.000.000.000,00	5,00	unit	5.000.000.000,00	5,00	unit	5.000.000.000,00	5,00	unit	5.000.000.000,00	5,00	unit	5.000.000.000,00		

Meningkatkan konektivitas antar distrik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														450.000.000,00			8.800.000.000,00					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan			100,00	%									100,00	%	450.000.000,00	100,00	%	8.800.000.000,00			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan												1,00	Dok	300.000.000,00							
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase																300,00	M	7.500.000.000,00			
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase																300,00	M	500.000.000,00			
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase																150,00	M	150.000.000,00			
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase																300,00	M	500.000.000,00			
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase yang di Rehabilitasi												150,00	M	150.000.000,00	150,00	M	150.000.000,00				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																					130.000.000,00	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman																	100,00	%	130.000.000,00		
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	1,00	Keg	100.000.000,00			
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	1,00	Keg	30.000.000,00			



			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang diebarkan			2,00 Km	3.000.000.000,00	2,00 Km	3.000.000.000,00	2,00 Km	3.000.000.000,00	2,00 Km	3.000.000.000,00	2,00 Km	3.000.000.000,00		
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di rekonstruksi			1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00		
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Terpelihara			1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00		
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Terpelihara			1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00	1,00 Km	1.000.000.000,00		
			Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Terbangun			15,00 M	3.000.000.000,00	15,00 M	3.000.000.000,00	15,00 M	3.000.000.000,00	15,00 M	3.000.000.000,00	15,00 M	3.000.000.000,00		
			Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang DiRehabilitasi			15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00		
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang DiPelihara			15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00	15,00 M	1.000.000.000,00		
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pengawasan			12,00 Bulan	50.000.000,00	12,00 Bulan	50.000.000,00	12,00 Bulan	50.000.000,00	12,00 Bulan	50.000.000,00	12,00 Bulan	50.000.000,00		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									100.000.000,00		2.200.000.000,00		200.000.000,00		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Tata Ruang			100,00 %	-	100,00 %	-	100,00 %	100.000.000,00	100,00 %	2.200.000.000,00	100,00 %	200.000.000,00	100,00 %	-
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RAPERDA yang ditetapkan									1,00 Dok	2.000.000.000,00				
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang							1,00 Keg	100.000.000,00	1,00 Keg	200.000.000,00	1,00 Keg	200.000.000,00		



## BAB VII

### KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. Indikator Kinerja Dinas PUPR Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Perumusan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya yang merupakan indikator kinerja Program yang bersifat hasil ( outcome ) tahun 2018 merupakan capaian realisasi kinerja awal perencanaan.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Dinas PUPR yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Presentasi anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai		1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4
2	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Predikat	57,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80.00
3.	Presentase Peningkatan Kapasitas ASN DPUPR	(%)		10	20	25	30	40	40
4	Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	(%)	38,87	39,06	45,54	41,39	42,70	43,85	43.85

5	Presentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	(%)	76,32	77,10	78,40	79,50	80,60	81,70	76,32
6	Presentase rumah tangga yang bersanitasi	(%)	66,32	67,10	68,40	69,50	35,80	71,70	72,32
7	Cakupan jumlah kampung yang telah memiliki infrastuktur air bersih	(%)	50,00	50,10	52,00	55,00	60,00	70,00	50,00
8	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian	(%)	20,00	22,00	25,00	28,00	30,00	35,00	20,00
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	(%)	70,79	71,50	72,40	73,50	74,60	75,00	70,79
10	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	(%)	71,89	72,80	73,00	74,50	75,40	76,00	71,89
11	Cakupan OPD yang memiliki gedung kantor yang representatif	(%)	80,00	90,00	95,00	96,00	97,00	97,00	80,00
12	Cakupan distrik yang sudah memiliki gedung kantor yang representatif	(%)	50,00	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	50,00
13	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	(%)	45,00	60,00	65,00	67,00	70,00	75,00	45,00
14	Cakupan ruang publik yang berubah peruntukannya per tahun	(%)	50,00	50,00	50,00	75,00	80,00	85,00	50,00
15	Presentasi ketaatan terhadap RTRW	(%)	26,68	27,03	28,44	32,43	37,14	43,88	26,68

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2018-2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018-2023.

Wamena, Desember 2021  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Jayawijaya

  
**HANDIKY KINDANGAN, SE.MM**  
PEMBINA Tk I  
NIP. 197010022000121008



